BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikatoryang lain yaitu distribusi pendapatan.

Pada hakekatnya, pertumbuhan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan pekerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan mutu modal manusia yang memilki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Pembangunan manusia ini dapat dilakukan dengan

meningkatkan beberapa aspek yang penting bagi kehidupan manusia, yaitu usia hidup, pendidikan, dan standart hidup layak. Berdasarkan beberapa aspek tersebut UNDP (*United Nation Development Progamme*) dalam publikasi BPS telah menetapkan standart pengukuran pembangunan sumberdaya manusia yang dituangkan dalam *Human Development Indeks* (HDI/IPM).

Indeks pembangunan manusia merupakan konsep pembangunan manusia yang memperhatikan kualitas hidup masyarakat untuk memberikan pilihan-pilihan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, pendidikn, dan kemampuan dalam meningkatkan daya beli. Hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan adalah upaya pembangunan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat salah satunya kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh kebanyakan negara yang sedang berkembang, kemiskinan merupakan masalah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain pengangguran, pendidikan, kesehatan dan tingkat pendapatan masyarakat.[2]

Setiap tahun Badan Pusat Statistik (BPS) nasional terbitkan tingkat IPM dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Tujuan diterbitkan nilai IPM setiap provinsi adalah untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan manusianya. Selain itu, dapat dijadikan sebagai sarana atau alat untuk membndingkan ketercapainya IPM setiap provinsi di Indonesia.

[2] Prima Sukmaraga, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per Kapita, dan jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah,* (Universitas Diponegoro, 2011)

Setelah membandingkan dapat diketahui provinsi-provinsi dengan nilai IPM rendah dan tinggi. IPM di Provinsi Pulau Jawa mengalami peningkatan setiap Tahun dari tahun sebelumnya dan cukup signifikan tetapi masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Tinggi dan Rendahnya IPM di Provinsi Pulau Jawa diketahui dari data publikasi BPS Indonesia pada Tahun 2018. Dapat kita amati data dibawah yang menunjukkan IPM di Provinsi Pulau Jawa.

Tabel 1.1
Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Jawa pada Tahun 2014-2018

Provinsi	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**				
	2014	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Jawa Barat	68.80	69.50	70.05	70.69	71.30
Jawa Timur	68.14	68.95	69.74	70.27	70.77
Jawa Tengah	68.78	69.49	69.98	70.52	71.12
DKI Jakarta	78.39	78.99	78.99	80.06	80.47
DI Yogyakarta	76.81	77.59	78.38	78.89	79.53
Banten	69.89	70.27	70.96	71.42	71.95

Sumber:Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020[3]

Bedasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa perkembangan manusia di Provinsi Pulau Jawa terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka IPM secara konsisten selama periode tahun 2014-2018. Tercapainya IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini, menjadi pertanda bahwa kualitas pembangunan manusia di Provinsi Pulau Jawa yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi juga semakin membaik. Angka IPM Jawa Barat pada tahun 2018 mencapai 71,3. Angka IPM Jawa Timur pada tahun 2018 mencapai

[3]Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses dari https://www.bps.go.id, pada hari Senin 16 Maret 2020 Pukul 19.42 WIB

70,77. Angka IPM Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 71,12. Angka IPM DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 80,47. Angka IPM DI Yogyakarta pada tahun 2018 mencapai 79,53. Angka IPM Banten pada tahun 2018 mencapai 71,95. Berarti tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat dikatakan kondisi pembangunan manusia yang ideal (IPM ideal = 100).

Indeks Pembangunan Manusia harus diarahkan sedemikian rupa sehingga setiap tahap semakin mendekati tujuan. Masalah besar dalam pembangunan yang dihadapi banyak negara berkembang termasuk Indonesia adalah kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks, negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun cukup besar rakyatnya yang tergolong miskin. Pada hakekatnya pembangunan perekonomian merupakan rangkayan kegiatan dengan memanfaatkan seluruh potensi sebagai modal dasar yang efektif dan efisien melalui perencanaan dalam rangka peningkatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang tidak lepas dari keberasilan

pembangunan ekonomi dan diukur dalam tingkat pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah.[4]

Untuk wilayah provinsi Pulau Jawa perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga tingkat kemiskinan di provinsi dapat seemakin ditekan. Besarnya jumlah angkatan kerja menuntut lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Lapangan kerja datang dari pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi tidak selalu menghasilkan lapangan pekerjaan yang besar. sehingga akan selalu ada angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar. Bagian yang tidak terserap oleh pasar ini dikenal sebagai penganggur dan rasio penganggur terhadap total angkatan kerja disebut istilah pengangguran.

Hubungan indeks pembangunn manusia dengan tingkat pengangguran bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan pembangunan itu sendiri. Pembangunan manusia memainkan peranan kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara dalam menyerap teknologi modern untuk mengembangkan kapasitasnya agar tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pada akhirnya akan tercipta kesempatan kerja untuk mengurangi jumlah pengangguran yang berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa dengan pembangunan manusia yang iukur melalui besarnya nilai IPM akan berdampak pada rendahnya tingkat pengangguran di suatu wilayah.[5]

---

[4] M. Alhudori, "Pengaruh IPM, PDRB dan Jumlah Pengangguran terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jambi", *Jurnal of Econimics and Business, Vol.1 No.1September 2017*

[5] Dwi Mahroji & Iin Nurkhasanah, "Pengaruh IPM terhadap Pengangguran di Provinsi Banten", *Jurnal Ekonomi-Qu, Vol. 9 No.1 April 2019*

Pengangguran merupakan indikator output ketenagakerjaan yang mengambarkan ketenagakerjaan dan proposi angkatan kerja yang menjadi penganggur atau tidak memilik pekerjan tapi aktif mencari pekerjaan/mempersiapkan suatu usaha. Dengan demikian tingginya pengangguran mempunyai implikasi sosial yang luaskarena pengangguran menjadi penyebab utama timbulnya kemiskinan. Sementara dari sisi ekonomi, mereka yag menjadi penganggur tidak mempunyai pendapatan sehingga akan berkurang konsumsinya. Kondisi ini secara agregat berarti melemahkan perkembangan konsumsi rumah tangga keseluruhan serta mengurangi pengangguran menggambarkan inefisinsi perekonomian suatu wilayah. Semkin tinggi pengangguran semakin tidk efisien pula perekonomian wilayah.

Menurut Gregory, Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi, tidaklah mengejutkan pengangguran menjadi topik yang sering di perdebatkan dalam masalah politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.[6]

Upaya menurunkan pengangguran dan menurunkan kemiskinan adalah sama pentingnya. Secara teori jika masyarakat tidak menganggur

[6] N. Gregory Mankiw, *Makro Ekonomi. Terjemahan : Fitria Liza, Imam Nurmawan*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm 150

berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan hidup terpenuhi maka tidak akan miskin. Sehingga dikatakan dengan pengangguran rendah (kesempatan kerja tinggi) maka kemiskinan juga rendah.[7]Sukirno menjelaskan bahwa pengangguran merupakan keadaan dimana penduduk yang masuk usia kerja, yang menginginkan pekerjaan namun belum mendapatkannya, dari penjelasan Sukirno di atas jelas bahwa yang masuk kategori pengangguran ini terbatas pada orang-orang atau penduduk yang sudah masuk usia kerja dan yang menginginkan pekerjaan atau ingin mendapatkan pekerjaan saja, sehingga anak-anak sekolah, ibu rumah tangga, maupun anak orang kaya yang tidak bekerja serta tidak aktif mencari pekerjaan, maka tidak disebut sebagai pengangguran.[8]

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan bermanfaat untuk digunakan di dunia kerja. Jika beberapa tahun yang lalu diwajibkan sekolah dari pendidikan dasar dan menengah. Namun sekarang, pendidikan dikembangkan hingga pendidikan tinggi. Halini diharapkan mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

---

[7]Yarlina Yacoub, "Pengruh Tingkat Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat",*Jurnal EKSOS, Vol. 8 No. 3* Oktober 2012, hlm 176-185

[8]Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi : Teori Pengantar,* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015) hlm 13

Selain faktor ekonomi tersebut, pendidikan juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian. Menurut Edgar Dalle, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang.[9]

Berikut pemaparan data angka kemiskinan, angka pengangguran, pendidikan dan IPM di Provinsi Pulau Jawa, dalam penelitian ini, lokasi yang diambil adalah provinsi yang berada di Pulau Jawa yang meliputi : Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, DI Yogyakarta ini merupakan Provinsi yang terletak pada Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan daerah yang memiliki kepenudukan yang paling tinggi di Indonesia. Dibawah ini terdapat tabel mengenai Data Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018.

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah di Provinsi Pulau Jawa Tahun 2018

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah
1	Jawa Barat	48 475,50	35,4000
2	Jawa Timur	39 521,90	47,8000
3	Jawa Tengah	34 358,50	32, 8000
4	Banten	12 530,80	9,7000
5	DKI Jakarta	10 428,00	664.01
6	DI Yogyakarta	3 818,30	3,1000

[9]Amos Neolaka dan Grace Amalia A. Neolaka, *Landasan Pendidikan : Dasar Pengenalan Diri Sendiri Menuju Perubahan Hidup,* (Jakarta : Kencana, 2017), hal. 11.

Sumber:Badan Pusat Statistik Indonesia, 2020[10]

Pada tabel 1.2 merupakan data Provinsi Terbesar di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan Provinsi dengan daerah yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Pada tahun 2018 Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar dari pada provinsi lainya yaitu sebesar 48 475,50 dan memiliki luas wilayah 35,4000. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk 39 521,90 Juta dan luas wilayah 47,8000 dan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk 34 358,50 dan luas wilayah 32,8000. Provinsi Banten memiliki jumlah penduduk 12 530,80 dan luas wilayah 9,7000. Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk 10 428,00 dan luas wilayah 664.01. Provinsi DI Yogyakarta memiliki jumlah penduduk 3 818,30 dan luas wilayah 3.1000.

Tidak bisa dipungkiri jika provinsi tersebut memiliki jumlah penduduk yang besar dikarenakan wilayahnya yang begitu luas dan Pulau Jawa merupakan pusat perekonomian. Namun seiring dengan bertumbuhnya jumlah penduduk, akan mengakibatkan masalah kemiskinan. Karena dengan banyaknya jumlah penduduk dapat mengakibatkan tingkat pengangguran tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan.

[10]Badan Pusat Statistik Indonesia, diakses dari https://www.bps.go.id, pada hari Senin 16 Maret 2020 Pukul 19.42 WIB

Tabel 1.3
Data Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan dan IPM di Provinsi Jawa Barat Pada Tahun 2014-2018

No	Tahun	Kemiskinan	Pengangguran	Pendidikan	IPM
1	2014	9.18	8,45%	98.42	68.80
2	2015	9.57	8,72%	98.52	69.50
3	2016	8.77	8,57%	98.57	70.05
4	2017	7.83	8,22%	98.81	70.69
5	2018	7.45	8,17%	98.73	71.30

Sumber:Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2020[11]

Bedasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan jumlah masyarakat yang tergolong miskin di Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2014 jumlah kemiskinan mencapai 9.18. pada tahun 2015 jumlah kemiskinan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan pada tahun 2016-2018 jumlah kemiskinan mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini memicu naik turunya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat dan mengalami inflasi yang tidak didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 tingkat pengangguran 8,45%. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran mengalami kenikan menjadi 8,72%. Pada tahun 2016-2018 tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi 8,17%. Pada tahun 2014 sampai 2018 pendidikan di Jawa Barat Mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sedangkan pendidikan di provinsi pulau jawa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Perekmbangan Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari meingkatnya angka IPM secara konsisten selama tahun 2014-2018. IPM yang terus meningkat dari

[11]Badan Pusat Statistik Jawa Barat, diakses dari https://www.bps.go.id, pada hari Senin 16 Maret 2020 Pukul 19.42 WIB

tahun ke tahun ini, menjadi pertanda bahwa kualitas pemabangunan manusia di provinsi Jawa Barat semakin membaik.

Tabel 1.4
Data Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan dan IPM di Provinsi Jawa Timur Pada Tahun 2014-2018

No	Tahun	Kemiskinan	Pengangguran	Pendidikan	IPM
1	2014	12.28	4,19%	94.69	68.14
2	2015	12.28	4,47%	95.26	68.95
3	2016	11.85	4,21%	95.47	69.74
4	2017	11.2	4,00%	95.91	70.27
5	2018	10.98	3,99%	95.24	70.77

Sumber:Badan Pusat Statistik Jawa Timur,2020[12]

Bedasarkan tabel 1.4 diatas menunjuk kanjumlah masyarakat yang tergolong miskin di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2014 jumlah kemiskinan mencapai 12.28 dan pada tahun 2015 tingkat presentase kemiskinan tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan. pada tahun 2016-2018 tingkat kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini memicu naik turunya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dan mengalami inflasi yang tidak didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 tingkat pengangguran 4,19%. Pada tahun 2015 tingkat pengangguran mengalami kenikan menjadi 4,47%. Pada tahun 2016 tingkat pengangguran menurun menjadi 4,21%. Pada tahun 2017-2018 tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi 3,99%. Perekmbangan Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur terus mengalami perbaikan. Sedangkan pendidikan di provinsi pulau jawa

[12]Badan Pusat Statistik Jawa Timur, diakses dari https://jatim .bps.go.id, pada hari Senin 16 Maret 2020 Pukul 19.42 WIB

mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari meingkatnya angka IPM secara konsisten selama tahun 2014-2018. IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini, menjadi pertanda bahwa kualitas pemabangunan manusia di provinsi Jawa Timur semakin membaik.

Tabel 1.5
Data Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan dan IPM di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Kemiskinan	Pengangguran	Pendidikan	IPM
1	2014	13.58	5,68%	94.67	68.78
2	2015	13.32	4,99%	94.88	69.49
3	2016	13.19	4,63%	95.11	69.98
4	2017	12.23	4,57%	95.64	70.52
5	2018	11.32	4,51%	95.28	71.12

Sumber:Badan Pusat Statistik Jawa Tengah,2020 [13]

Bedasarkan tabel 1.5 diatas menunjuk kanjumlah masyarakat yang tergolong miskin di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2014-2017 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 12.23 setiap tahunnya dan pada tahun 2018 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 11.32. Hal ini memicu naik turunya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 tingkat pengangguran 5,68%. Pada tahun 2016-2018 tingkat pengangguran mengalami penurunan dari tahun ke tahun menjadi 4,51%. Perekmbangan Pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami perbaikan. Sedangkan pendidikan di provinsi pulau jawa mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Hal ini

[13]Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, diakses dari https://www .bps.go.id, pada hari Senin 16 Maret 2020 Pukul 19.42 WIB

terlihat dari meingkatnya angka IPM secara konsisten selama tahun 2014-2018. IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini, menjadi pertanda bahwa kualitas pemabangunan manusia di provinsi Jawa Tengah semakin membaik.

Tabel 1.6
Data Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan dan IPM di Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Kemiskinan	Pengangguran	Pendidikan	IPM
1	2014	4.09	8,47%	99.54	78.39
2	2015	3.61	7,23%	99.59	78.99
3	2016	3.75	6,12%	99.64	79.60
4	2017	3.78	7,14%	99.68	80.06
5	2018	3.57	6,24%	99.12	80.47

Sumber:Badan Pusat Statistik DKI Jakarta,2020[14]

Bedasarkan tabel 1.6 diatas menunjuk kanjumlah masyarakat yang tergolong miskin di Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 2014-2018 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 3.57 setiap tahunnya. Tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 tingkat pengangguran 8,47%. Pada tahun 2015-2018 tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi 6,24%. Sedangkan pendidikan di provinsi pulau jawa mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Perekmbangan Pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari meingkatnya angka IPM secara konsisten selama tahun 2014-2018. IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini, menjadi pertanda bahwa kualitas pemabangunan manusia di provinsi DKI Jakarta semakin membaik.

[14]Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, diakses dari https://www .bps.go.id, pada hari Senin 16 Maret 2020 Pukul 19.42 WIB

Tabel 1.7
Data Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan dan IPM di Provinsi Banten Pada Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Kemiskinan	Pengangguran	Pendidikan	IPM
1	2014	5.51	9,07%	97.27	69.89
2	2015	5.75	9,55%	98.14	70.27
3	2016	5.36	8,92%	98.19	70.96
4	2017	3.78	9,28%	98.13	71.42
5	2018	3.57	8,52%	98.17	71.95

Sumber:Badan Pusat Statistik Banten, 2020[15]

Bedasarkan tabel 1.7 diatas menunjukkan jumlah masyarakat yang tergolong miskin di Provinsi Banten. Pada tahun 2014-2017 tingkat kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 3.78. pada tahun 2018 tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 3.57. Tingkat pengangguran di Provinsi Banten pada tahun 2014 tingkat pengangguran 9,07%. Pada tahun 2015-2018 tingkat pengangguran mengalami penurunan menjadi 8,52%. Sedangkan pendidikan di provinsi pulau jawa mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Perekmbangan Pembangunan manusia di Provinsi Banten terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari meingkatnya angka IPM secara konsisten selama tahun 2014-2018. IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini, menjadi pertanda bahwa kualitas pemabangunan manusia di provinsi Banten semakin membaik.

[15]Badan Pusat Statistik Banten, diakses dari https://www .bps.go.id, pada hari Senin 16 Maret 2020 Pukul 19.42 WIB

Tabel 1.8
Data Kemiskinan, Pengangguran, Pendidikan dan IPM di Provinsi DI Yogyakarta Pada Tahun 2014-2018

No.	Tahun	Kemiskinan	Pengangguran	Pendidikan	IPM
1	2014	14.55	3,33%	94.44	76.81
2	2015	13.16	3,33%	94.50	77.59
3	2016	13.1	3,33%	94.59	78.38
4	2017	12.36	3,33%	94.64	78.89
5	2018	12.13	3,33%	94.83	79.53

Sumber:Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, 2020[16]

Bedasarkan tabel 1.8 diatas menunjukkan jumlah masyarakat yang tergolong miskin di Provinsi DI Yogyakarta. Pada tahun 2014-2018 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 12.13. Tingkat pengangguran di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2014 sampai 2018 tingkat penganggurannya staabil tidak naikdan tidak trun sebesar 3,33%. Sedangkan pendidikan di provinsi pulau jawa mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Perekmbangan Pembangunan manusia di Provinsi DI Yogyakarta terus mengalami perbaikan. Hal ini terlihat dari meingkatnya angka IPM secara konsisten selama tahun 2014-2018. IPM yang terus meningkat dari tahun ke tahun ini, menjadi pertanda bahwa kualitas pemabangunan manusia di provinsi DI Yogyakarta semakin membaik.

Dari data kemiskinan, pengangguran dan pendidikan di Provinsi yang ada di Pulau Jawa muncul ketertarikan untuk meniliti karena dalam data kemiskinan pada tahun 2014-2018. Dari data kemiskinan tercatat pada periode september 2014 ke maret 2015, diantaranya dipicu oleh

[16]Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, diakses dari https://www.bps.go.id, pada hari Senin 16 Maret 2020 Pukul 19.42 WIB

kenaikan harga bahan bakar minyak pada november 2014, dan juga imbas perlambatan ekonomi yang menekan indikator kesejahteraan di sektor rill. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk miskin hingga sebanyak 780 ribu orang perseptember 2015 menjadi 28,51 juta orang dibanding posisi september 2014, disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah sehingga tidak bisa/tidak mampu menyerab angkatan kerja yang masuk kepasar tenaga kerja. Alhasil, pengangguran meningkat yang membuat angka kemiskinan meningkat. Perekonomian yang tumbuh rendah tidak bisa atau tidak mampu menyerap angkatan kerja yang masuk ke pasar tenaga kerja atau terjadi *jobless growth*. Pertumbuhan yang sedikit menyerap tenaga kerja bisa jadi karena industri yang lebih memilih industri mesin.[17]

Dari data Pengangguran pada tahun 2014 – 2018 masih cukup tinggi, penyebab peningkatan tingkat pengangguran terbuka yaitu adanya pemutusan hubungan kerja serta daya serap yang menurun karena peningkatan jumlah angkatan kerja, pengangguran terbuka tertinggi dia alami para lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu hinga 12,65%, diikuti Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 10,32%. Faktor penyebab lainya populasi penduduk Indonesia yang besar sehingga memunculkan angkatan kerja baru tiap tahunnya dan berdampak pada tingkat pengangguran. Hasil proyeksi pendudukoleh BPS, pada 2035 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai lebih 300

[17] Kepadatan Penduduk Pulau Jawa , di akses dari https://www.kompasiana.com. Pada hari senin 29 juni 2020

Juta jiwa dimana populasi penduduk Indonesia lebih di dominasi oleh kelompok umur produktif.

Terkait masalah pengangguran, baik Indonesia maupun dunia tengah memasuki eraa revolusi industri 4,0 dimana teknologi dapat digunakan untuk menagganti tenaga kerja manusia. diduga dampak revolusi industri 4,0 akan menyebabkan 50 juta orang akan kehilangan pekerjaan atau hampir separu dari total angkatan kerja di Indonesia. Hal itu terjadi karena tenga kerja di Indonesai masih rentan terhadapperkembangan teknologi.[18]

Pendidikan dari tahun 2014-2018, masyarakat yang masih kurang sadar dan tidak ingin berkembang untuk mengubah nasib melalui pendidikan. Sebagaian masyarakat masih menilai bahwa pendidikan itu bukan suatu bagian terpenting untuk mengurangi masalah kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung memiliki ketermpilan, wawasan, dan pengetahuanyang kurang memadai untuk kehidupannya.

Alasan penulus meneliti Provinsi yang ada di Pulau Jawa karena jumlah penduduk yang tertinggi di Indonesia terletak pada Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk yang paling tinggi dibandingkan Pulau Sumatra dan Kalimantan yang menerapkan 2 pulau besar yang

[18]Dian & Herniawati Retno Handayani, Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikaan, Upah minimum dan PDRB terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah, *Diponegoro Journal of Economics, Vol 1 No. 1 hlm 159*

dimiliki Indonesia. Hal ini disebabkan karena hampir semua aspek kegiatan terpusat di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, kepadatan penduduk di Indoensia pun tidak merata. Dengan kepadatan penduduk yang tidak merata menimbulkan bebrapa permasalahan dalam aspek kependudukan yang berakibat pada aspek lainnya, munculnya permukiman kumuh, kebutuhan akan lapangan pekerjaan di suatu wilayah, kemacetan, kemiskinan dan sebagainya. Tapi selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi kepadatan yang tidak merata salah satunya adalah pengembangan dan pembangunan infrastruktur.[19] Oleh sebab itu di pulau jawa peerlu adanya tinjauan ulang terkait bagaimana membangun kualitas kesejahteraan masyarakat atau penduduk di provinsi pulau jawa dan untuk melihat pemerintah dalam mengelola pembangunan ekonomi. oleh karena itu peneliti mengambil judul pengaruh angka kemiskinan, pengangguran dan pendidikan terhadap IPM di provinsi Pulau Jawa tahun 2014-2018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perlu adanya identifikasi masalah penelitian aagar peneliti yang dilakukan memiliki ruang lingkup yag jelas. Terdapat beberapa masalah dalam penelitin yaitu :

1. Tingkat kemiskinan selama tahun 2014-2018 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami kenaikan setiap tahunya. Sedangkan Provinsi DKI Yogyakarta, Banten dan DI Yogyakarta

[19] Kepadatan Penduduk Pulau Jawa , di akses dari https://www.kompasiana.com. Pada hari senin 29 juni 2020

mengalami penurunan setiap tahunnya. Penanggulagan kemiskinan masih jauh dari induk permasalahan kebijakan dan program yang dilaksanakan belum menampakkan hasil yang optimal.

2. Tingkat pengangguran selama tahun 2014-2018 di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jaawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, DKI Yogyakarta menunjukkan beberapa hal yang perlu diidentifikasi. Dari data yang diolah, tingkat pengangguran tahun 2014-2018 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Hal ini tidak sesuai dengan beberapa teori yang mengatakan bahwa peningkatan pengangguran akan diiringi oleh peningkatan kemiskinan. Berarti terdapat faktor lain yang lebih mengaruhi turunya tingkat kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa.
3. Pendidikan di provinsi Pulau Jawa menunjukkan beberapa hal yang perlu diidentifikasi. Dari data yang diolah, pendidikan dari tahun 2014-2018 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Hal inimenunjukkan rendahnyapendidikan seseorang yang dapat menyebabkan berkurangnya pengetahuan daan keterampilan, sehingga meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.
4. Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Pulau Jawa. Perkembangan kesejahteraan manusia dinilai dari IPM yang diukur dari beberapa indikator. Dari data yang diolah, IPM Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2014-2018 terus mengalami kenaikan yang pelan tapi pasti. Jika dilihat dari data penduduk miskin di Provinsi Pulau Jawa terdapat penurunan kemiskinan yang cukup signifikan, sedangkan data IPM kenaikan IPM

tidak begitu signifikan. Hal ini berarti dimungkinkan terjadi hal lain atau faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penurunan kemiskinan yang signifikan pada tahun yang sama.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Angka Kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Pulau Jawa pada tahun 2014-1018 ?
2. Babagaimana pengaruh Angka Pengangguran terhadap IPM di Provinsi Pulau Jawa pada Tahun 2014-2018 ?
3. Bagaimana Pendidikan terhadap IPM di Provinsi Pulau Jawa pada tahun 2014-2018 ?
4. Bagaimana Angka Kemiskinan, Pendidikan dan Angka Pengangguran secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Pulau Jawa pada Tahun 2014-2018 ?

D. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah maka tujuan peneliti ini adalah :

1. Untuk menguji variabel Angka Kemiskinan terhadap IPM di Provinsi Pulau Jawa pada tahun 2014-1018.
2. Untuk menguji variabel Angka Pengangguran terhadap IPM di Provinsi Pulau Jawa pada Tahun 2014-2018.
3. Untuk menguji variabel Pendidikan terhadap IPM di Provinsi Pulau Jawa pada Tahun 2014-2018.

4. Untuk menguji variabel Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Pulau Jawa pada Tahun 2014-2018.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan pengetahuan baru kepada pembaca mengenai pengaruh Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran terhadap IPM di Provnsi Pulau Jawa.
   b. Memberikan gambaran apakah kontribusi angka kemiskianan, pendidikan dan angka pengangguran terhadap IPM di Provinsi Pulau Jawa.
2. Secara Praktis
   a. Bagi Pemerintah
      a) Hasil penelitian ini di harapkan dapat digunakan dalam memilih kebijakan dan mengalokasikan anggaran yang lebih efektif dalam meningkan variabel IPM, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Pulau Jawa.
      b) Sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan IPM di Provinsi Pulau Jawa.
   b. Bagi Akademik

Penlitian ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa IAIN Tulungaggung dan menjadi refrensi serta acuan untuk menambah wawasan dalam mengembangkan pengetahuan dan informasi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan refrensi bagi yang tertarik pada penelitian tentang IPM di Provinsi Pulau Jawa.

F. Runang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah menguji variabel Angka kemiskinan, angka pengangguran dan Pendidikan terhadap Indeks pembangunan manusia, sedangkan keterbatasan peneltian ini karena ketersediaan keterbatasan data yang tersedia, penliti mengguanakan data dalam kurun waktu tahun 2014-2018.

G. Penegasan Istilah

Definisi penegasan istilah adalah batasan yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian. Oleh karena itu, definisi ini disebut juga definisi kerja karena dijadikan pedoman untuk melaksanakan suatu penelitian

1. Definisi Konseptual

a. Kemiskinan (X_1)

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidak mampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Secara umum, kemiskinan diartikan sebagai kondisi

ketidakmampuan pendapatan dalam mencakupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup.[20]

b. Pengangguran (X_2)

Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran.[21]

c. Pendidikan (X_3)

Pendidikan adalah hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menjamin sosial dan ekonomi.[22] Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. dengan pendidikan dapat ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan yang selanjutnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Pendidikan dapa pula dilihat sebagai investasi sumber daya manusia dan hasilnya akan diperoleh beberapa tahun kemudian.[23]

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)(Y)

---

[20]Suryawati, *Teori Ekonomi Mikro,* (Yogyakarta : Jamasy, 2004), hlm 122

[21] Sudono Sukirno, *Makro Ekonomi Moderen*, (Jakarta: PT: Raja Grafindo Persada, 2000). hal. 35

[22] Michael, dkk, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2006) ,hlm.434

[23] Nurul Huda dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam,* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.174

merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia.[24]

2. Definsi Operasional

Definisi operasional yang dimaksud untuk memberikan kejelasan mengenai judul penelitian agar tidak muncul berbagai penafsiran terhadap peneltian, dari judul "Pengaruh Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, dan Pendidikan Terhadap IPM di Provinsi Pulau Jawa periode 2014-2018" yaitu untuk mengetahui tingkat. Penelitian ini secara operasional dimaksud untuk menguji variable X_1, X_2, X_3 yaitu angka kemiskinan ddan angka pengangguran dan Variabel Y yaitu Indeks pembangunan manusia.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi 3 BAB. Adapun masing – masing BAB akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam pendahuluan ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, sistematika skripsi

BAB II : Landasan teori, dalam bab ini terdpat 3 bagian yaitu pertama landasan teori yang berisi uraian literatur, jurnal, referensi dan lain – lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Kedua,

[24]IPM , diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia pada hari Rabu 18 Maret 2020, pukul 14.30 WIB

penelitian ini berisi kajian penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Ketiga, berisi kerangka berpikir untuk menyusun hipotesis yang dirumuskan.

BAB III **:** Metode penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis terkah